

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

DI ERA DISENTRALISASI

(Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban)



Oleh:

KHOIRUL ASIAH S.Pd.I

NIM: 07. 223. 707

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

DEPARTEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis :

Nama : Khoirul Asiah, S.Pd.I

NIM : 07.223.707.

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 November 2009



Khoirul Asiah
Khoirul Asiah, S.Pd.I

NIM: 07.223.707

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

TESIS berjudul : STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI ERA DISENTRALISASI
(Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban)

Nama : Khoirul Asiah, S.Pd.I
NIM : 07.223.707
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 15 Januari 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Maret 2010



Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain,
NIR 19490914 197703 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

TESIS berjudul : STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI ERA DISENTRALISASI
(Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban)

Nama : Khoirul Asiah, S.Pd.I
NIM : 07.223.707
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 15 Januari 2010

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Sumedi, M.Ag
Pembimbing/Penguji : Prof. Drs. H. Sarbiran, M.Ed., Ph.D
Penguji : Dr. Sembodo Ardi Widodo, M.Ag

(
(
(
(
(



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2010

Waktu : Pukul 09.00 s.d 10.00 WIB

Hasil / Nilai : B+ / 3,25

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi, terhadap tesis saudara
Khoirul Asiah, S.Pd.I. NIM: 07.223.707 yang berjudul:

**STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI ERA DISENTRALISASI
(Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban)**

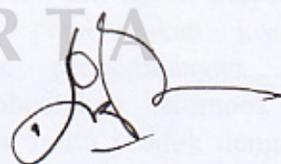
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam
rangka memperoleh derajat Magister dalam ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Desember 2009

Pembimbing



Prof. Drs. H. Sarbiran, M.Ed. Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis :

Nama : Khoirul Asiah, S.Pd.I

NIM : 07.223.707.

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 November 2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khoirul Asiah, S.Pd.I
NIM: 07.223.707



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi, terhadap tesis saudara Khoirul Asiah, S.Pd.I. NIM: 07.223.707 yang berjudul:

**STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI ERA DISENTRALISASI
(Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban)**

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Desember 2009

Pembimbing

Prof. Drs. H. Sarbiran, M.Ed. Ph.D

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) Apa kebijakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu di era desentralisasi. 2) Bagaimana proses penentuan kebijakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu. 3) Bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu pendidikan. 4) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan Tuban.

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, sebab penelitian ini bermaksud mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 jenis metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data yang terhimpun dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model siklus interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan hasil bahwa langkah proses penentuan kebijakan Dinas Pendidikan Tuban sebagai berikut: 1) Formulasi masalah, 2) Formulasi kebijakan, 3) Subjek yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan 5) Evaluasi kebijakan.

Kebijakan strategi Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu adalah: 1) Peningkatan mutu SDM *pertama* di internal; dengan pembinaan sistem informasi manajemen, *kedua* di eksternal, meliputi; a) Pendidik dan tenaga kependidikan melalui kualifikasi akademik, pembinaan sistem informasi manajemen dan pembinaan tenaga pendidik, pemilihan guru berprestasi, sertifikasi profesi guru, subsidi guru SD, penilaian kinerja kepala sekolah. b) Pemuda, meliputi; peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan penataran, dialog pemuda, kelompok usaha produktif, pembinaan sarjana penggerak pembangunan desa dan seleksi pemuda pelopor. c) Masyarakat, meliputi; pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan desa, pengadaan satu unit mobil perpustakaan keliling, pengembangan PAUD perkecamatan, pembentukan keaksaraan fungsional untuk pemberantasan buta aksara, pengembangan PKBM, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, pembentukan kelompok belajar usaha. 2) Peningkatan mutu proses. 3) Peningkatan mutu produk dengan cara pembangunan perpustakaan, Lab. IPA dan Lab. Komputer, pemberian beasiswa berprestasi dari SD,SMP,SMA/SMK, penyelenggaraan operasi sayang, kompetisi hasil-hasil pembelajaran, penyelenggaraan sekolah satu atap. 4) Peningkatan mutu layanan dengan cara sosialisasi program pendidikan, penjangkaran data jenjang pendidikan, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan. 5) Peningkatan mutu lingkungan dengan cara diadakan lomba lingkungan tingkat kabupaten yang disebut Tuban Karya Nugraha (TKN), membudayakan sistem disiplin kerja.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji penyusun panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA DESENTRALISASI (Studi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban).**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing dan menghadirkan pelita perubahan di dalam kehidupan ini.

Penulis sadari dalam menyusun Tesis ini sepenuhnya masih terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca sekalian, karena itu semua merupakan lemahnya kemampuan serta keterbatasan yang penulis miliki. Penulis juga menyadari bahwa kelancaran dari penulisan Tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku ketua Program Studi Pendidikan Islam.

3. Bapak Prof. Drs. H. Sarbiran, M.Ed. Ph. D. selaku pembimbing dan guru dalam hidup yang banyak memberikan nasehat dan masukan untuk menjadi generasi yang berwawasan mutu. Salam ta'dzim kami haturkan.
4. Semua dosen Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di PPS UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap TU PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu segala urusan administrasi penulis dalam penyelesaian tesis ini, khususnya mbak Danik dan Pak Rudy matur sembah nuwun.
6. Keluarga besar PMII Cab. Jogjakarta, keluarga besar Madura FS-KMMJ, keluarga besar Ronggolawe Tuban yang telah mengajarkan arti kebersamaan.
7. Keluarga besar Asrama Sri Gading Gendeng Imah trima kasih motornya, Poppy trima kasih sudah menunggu, Mbak Nan trima kasih printnya dan Keluarga besar Kebumen (Uus, Sulis, Isti).
8. Just for my baby "*Aura Ratu Shema Ahmad*" kamu pintar Nak, ngak rewel semoga kamu jadi pemimpin masa depan. Amin
9. Tak lupa juga seluruh keluarga besar MKPI '07 (pak Hasan, cak Fuad, Nana, ari, Muhaimin, Gus Dur, Pak Asep, Gus Ipul, Yana, Nisa, Wiwin, Noeng) yang telah membantu, baik saran maupun do'a semoga selalu dicurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.....

Yogyakarta, 01 November 2009

Penulis

Khoirul Asiah, S.Pd.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Pengesahan Direktur.....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	.7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Rencana Sistematika Pembahasan.....	17
Bab II : Kajian Teori	20
A. Studi Mutu Dan Kebijakan	20
1. Konsep Dasar Mutu.....	20

a. Pengertian mutu	20
b. Manajemen Mutu terpadu	22
c. Sasaran Mutu	28
d. Strategi Peningkatan Mutu	29
2. Konsep Mutu Dalam Pendidikan.....	36
3. Standar Nasional Mutu Pendidikan	38
B. Tinjauan Teori Kebijakan	45
1. Pengertian Kebijakan.....	45
2. Proses Penyusunan Kebijakan	50
3. Kebijakan Manajemen Lembaga.....	52
Bab III : Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	56
A. Sekilas Tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	56
B. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	56
1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	58
2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban	60
3. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	61
C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban	62
D. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Tuban Era Desentralisasi	63
E. Peta Perkembangan Pendidikan Kabupaten Tuban Era Desentralisasi..	66
F. Kondisi sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	74
G. Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Tuban ...	76

Bab IV Analisis dan Pembahasan	77
A. Proses Penentuan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.....	77
B. Orientasi Kebijakan Dinas Pendidikan Tuban Era Desentralisasi.....	81
C. Strategi Dinas Pendidikan Tuban dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.....	88
1. Strategi Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM)	90
2. Strategi Peningkatan Mutu Proses.....	100
3. Strategi Peningkatan Mutu Produk	107
4. Strategi Peningkatan Mutu Layanan	110
5. Strategi Peningkatan Mutu Lingkungan.....	113
D. Pendukung dan Penghambat Pengembangan Mutu Pendidikan.....	115
1. Faktor Pendukung	115
2. Faktor Penghambat	116
E. Analisis Mutu Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Mutu.....	116
 Bab V Penutup	 128
A. Kesimpulan	128
B. Saran-saran	131
 Daftar Pustaka	 132
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 th 1999 tentang pembagian wilayah kekuasaan dan otoritas, dari model sentralistik menjadi disentralistik, pemerintah daerah saat ini, memiliki kewenangan yang otonom di dalam mengatur dan menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan potensi dan kecenderungan masing-masing. Dalam arti tertentu, diberlakukannya UU Otonomi thn.1999 secara langsung telah membuka kemungkinan baru setiap daerah untuk meraih berbagai kemajuan yang lebih signifikan serta lebih aspiratif.

Salah satu kewenangan tersebut adalah di bidang pendidikan. Otonomi di bidang pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu sekolah-sekolah.

Berlakunya UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada awal tahun 2001, telah terjadi perubahan yang mendasar pada bidang pendidikan di daerah. Inti dari undang-undang tersebut adalah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999, *Pemerintah Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika)

Banyak yang beranggapan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberi harapan akan perbaikan penyelenggaraan pendidikan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas *outputnya*. Kesiapan dunia pendidikan dalam rangka otonomi pendidikan menjadi sangat strategis dan penting. Bila otonomi pendidikan dipahami sebagai proses kemandirian suatu lembaga, maka dunia pendidikan harus sesuai dengan enam tolok ukur keberhasilan desentralisasi pendidikan seperti mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.²

Meski banyak implikasi positif yang ada terkait dengan otonomisasi daerah, ternyata juga menyisakan segudang persoalan yang menggelisahkan. Untuk melakukan perubahan itu banyak tantangan. Tantangan terbesar dari perubahan diantaranya sikap mental dan perilaku yang belum sepenuhnya mau berubah. Para pemegang kebijakan banyak yang pola pikirnya sangat prosedural, yang terkadang sangat menghambat lahirnya kreatifitas, improvisasi, dan upaya-upaya inovatif. Padahal, inti dari pelaksanaan otonomi adalah agar ada kreatifitas atau kemandirian untuk mengolah dan mengatur rumah tangganya sendiri itu dimunculkan. Di samping itu kebijakan yang lahir era desentralisasi masih jauh dari harapan. Kebijakan yang mengarah pada kontekstualisasi daerah masih belum terwujud artinya ciri khas dari daerah masih belum tampak seperti halnya di kabupaten Tuban.

Di era disentralisasi, pendidikan adalah bagian dari urusan rumah tangga daerah. Karena itu Pemerintah daerah (pemda) mempunyai tanggung

² Made Pidarta, *Landasan Kependidikan* (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 1

jawab dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan potensi daerah. Implementasi desentralisasi pendidikan di satu sisi menghadapi masalah penyimpangan praktek otonomi, pada sisi lain dituntut untuk meningkatkan kualitas (mutu) pendidikan di daerah.

Perubahan struktur organisasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi diterapkan otonomi daerah akan berdampak terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat. Dampak positif yang diharapkan dengan adanya desentralisasi pendidikan adalah semakin optimalnya pelayanan lembaga pendidikan di daerah-daerah, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Melalui desentralisasi, maka aspirasi publik di daerah setempat lebih mudah terakomodir, termasuk aspirasi untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Terkait dengan hal di atas, Kabupaten Tuban mengalami masa transisi yaitu dari pertanian ke industri. Karena banyak sumber daya alam yang dieksplorasi, tentunya ini menjadi salah satu pemicu untuk mempercepat kualitas sumber daya manusia daerah Tuban di era industrialisasi. Dinas pendidikan Tuban mempunyai PR besar untuk mempercepat mutu pendidikan.

Implementasi desentralisasi pendidikan di kabupaten Tuban membutuhkan perangkat-perangkat yang dapat mendukung terciptanya situasi pendidikan yang kondusif. Perangkat-perangkat itu diantaranya upaya penyediaan dana pendidikan yang cukup, mutu sumber daya manusia dan juga manajemen pengelolaan yang baik. Semua itu akan terwujud apabila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mengarah pada upaya peningkatan mutu.

Dalam konteks ini, maka pejabat dinas pendidikan kabupaten mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan, untuk menghasilkan produk kebijakan yang menunjang otonomi daerah.

Berdasarkan hasil prasarvai bulan agustus lalu, masih ada kesan dari pemangku kebijakan dinas pendidikan kabupaten Tuban bahwa masih belum maksimal pengelolaan program kerjanya, minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan pendidikan sesuai dengan harapan yang terdapat dalam otonomi daerah, serta *mis match* SDM di dinas pendidikan Tuban. Melihat kenyataan diatas maka, strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pada analisis kebijakan akan menjadi fokus penelitian ini.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pra survai, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai guna menunjang pelaksanaan disentralisasi pendidikan di Tuban.
2. Masih adanya ketergantungan pegawai terhadap pimpinan yang berdampak pada disentralisasi pendidikan belum berjalan dengan baik.
3. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi manajemen di dinas pendidikan sehingga mempengaruhi pelaksanaan disentralisasi pendidikan.
4. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan implementasi pendidikan di kabupaten Tuban.
5. Kebijakan-kebijakan dinas pendidikan Tuban masih bersifat sentralistik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu di era desentralisasi?
2. Bagaimana proses penentuan kebijakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu?
3. Bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu pendidikan?
4. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengembangan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan Tuban?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses penentuan dan orientasi kebijakan era desentralisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tuban dalam meningkatkan mutu pendidikan
 - b. Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan dalam upaya peningkatan mutu dan kaitannya dengan kebijakan yang telah dibuat.
 - c. Untuk mengetahui strategi-strategi Dinas Pendidikan Tuban dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut.;

- a. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.
- b. Secara praktis yaitu untuk memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kantor dinas pendidikan kabupaten Tuban dalam mengembangkan mutu pendidikan.
- c. Kegunaan secara teoritis, bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan khazanah ilmiah bagi pengembangan bidang manajemen pendidikan Islam khususnya konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan Syamsudin (2003) tentang kesiapan sekolah dalam mewujudkan otonomi pendidikan; studi terhadap SLTP/MTs dan SMU/MA swasta di Lombok Nusa Tenggara Barat, menyimpulkan bahwa:

”Sekolah di Lombok pada era otonomi pendidikan memiliki potensi yang perlu dikembangkan antara lain: 1) sekolah dapat merencanakan program dengan bebas. 2) banyak tenaga, rekruten didasarkan pada kesediaan, pengalaman, dan dikembangkannya upaya sertifikasi. 3) fasilitas memadai. 4) biaya ditanggung pemerintah, orang tua dan

masyarakat. Penelitian ini secara garis besar manfaat adanya penerapan otonomi pendidikan.”³

Penelitian Hadiyanto tentang mencari sosok desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia, menyimpulkan bahwa fenomena yang ada dilapangan terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih semrawut terutama ketidaksiapan sekolah.⁴

Kajian pembahasan tersebut berbeda dengan tema yang disusun teliti saat ini. Walaupun ada sedikit persamaan dari tema tentang desentralisasi. Akan tetapi dari sekian tulisan di atas masih belum ada yang memfokuskan pada analisis kebijakannya. Untuk itu aksentuasi dari pembahasan penelitian ini adalah. strategi peningkatan mutu pendidikan era desentralisasi (studi kebijakan dinas pendidikan Tuban).

F. Kerangka Teori

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Konsep Mutu

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah adanya peningkatan mutu. Pada hakikatnya pandangan bahwa pengertian mutu dalam pendidikan sesungguhnya berkaitan erat dengan norma-norma yang mencerminkan keinginan institusi dengan titik berat pada aspek pendidikan. Semua

³ Syamsudin, "Kesiapan Sekolah Dalam Mewujudkan Otonomi Pendidikan; Studi Terhadap SLTP/MTs dan SMU/MA Swasta Di Lombok Nusa Tenggara Barat", Tesis Magister Pendidikan (Yogyakarta: Pascasarjana UNY, 2003), hlm. xi.

⁴ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2004) hlm.viii.

aktifitas yang berkaitan dengan pengajaran, perbaikan dan fungsi suatu organisasi diarahkan untuk memenuhi kepuasan tuntutan eksternal.

Konsep mutu dalam pendidikan menurut Aspin lebih dipertajam pada aspek-aspek; efisiensi, efektifitas, keunggulan (*excellence*), keadilan (*equity*) dan keadilan sosial.⁵

Sallis menyebutkan bahwa makna mutu atau kualitas dapat digunakan "*both as an absolute and a relative concept*".⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas dalam konsep absolut adalah "*the highest possible standart which can not be surprisded*".⁷ Dalam hal ini mutu mirip dengan suatu kebaikan, kecantikan, kepercayaan yang ideal tanpa ada kompromi. Sementara itu, dalam konsep relatif sesuatu dianggap berkualitas jika barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dalam konsep ini produk yang berkualitas adalah yang sesuai dengan tujuannya.

Djaswidi al-Hambali mengatakan bahwa mutu memiliki arti derajat (tingkat keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya), baik berupa barang maupun jasa; baik yang nyata (*tangible*) maupun yang tidak nyata (*intangibile*).⁸ Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi dapat didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas, mutu dapat

⁵ Aspin David A., *Quality Scholling* (Melbourn: Cassel, 1993), hlm. 35.

⁶ Edward Sallis, *Total Quality Managemen in education* (London: Kogan: Page Limited, 1993), hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁸ Djawidi Hambali, *Pengembangan Kepemimpinan Transformasional Pada Lembaga Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 159.

diartikan sebagai karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, dapatlah dikatakan bahwa kualitas atau mutu memiliki unsur-unsur: (a) usaha untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan (sesuai dengan persyaratan); (b) usaha untuk selalu memenuhi harapan, tuntutan, dan kepuasan pelanggan; (c) merupakan kondisi yang relatif dan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi; (d) ruang lingkungannya meliputi produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.

b. Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses luaran dan dampaknya. Danim mengatakan:

Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti pertauran, struktur organisasi, deskripsi kerja dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.⁹

Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada sistem pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan merupakan kemampuan

⁹ Sudarwan Danim, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan Teori*, (Jakarta: Proyek Penelitian Dikti, 2006), hlm.53.

manajemen dan teknis profesional dari suatu sistem pendidikan dalam memanfaatkan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

2. Pengertian Desentralisasi

Definisi desentralisasi secara umum adalah pemindahan tanggungjawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan serta pemanfaatan sumber daya serta kewenangan administratif dari pemerintahan pusat ke: 1) unit-unit teritorial dari pemerintah pusat atau kementerian, 2) tingkat pemerintahan yang lebih rendah, 3) organisasi secara otonom, 4) badan otoritas regional, 5) organisasi non pemerintah (ornop) atau organisasi yang bersifat sukarela. Desentralisasi adalah pengalihan tanggungjawab layanan sektor tertentu pada perwakilan pusat di daerah.¹⁰

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 bahwa; desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan serta meningkatkan pemerataan dalam penggunaan sumber daya publik.

¹⁰ Fasli Jalal (ed), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), hlm.75.

Terkait dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah perlu memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sementara itu, pusat mengurus hal-hal yang strategis pada tatanan nasional yaitu pengembangan kurikulum, bantuan teknis, bantuan dana, monitoring, pembakuan mutu dan pemberian kesempatan pendidikan pada kelompok masyarakat kurang beruntung.¹¹

Desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah ataupun pemerintah nasional, yaitu:

1. Desentralisasi dapat mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di Daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah yang bersifat heterogen.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang ruit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintahan pusat.
3. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99.

implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat pusat.¹²

3. Teori Kebijakan

Kebijakan tidak hanya mengkonsentrasikan dirinya pada pengambilan keputusan, lebih dari itu juga menekankan pada tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Yang dilakukan itu bukanlah kebijakannya melainkan programnya.¹³ Dalam studi kebijakan terdapat dua pendekatan, yaitu:

a. Analisis Kebijakan

Pendekatan ini lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembuatan keputusan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar rasional.

b. Kebijakan Publik Politik

Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil dan *out come* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.¹⁴

¹² Syaekani dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 33-35.

¹³ Noeng Muhadjir, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm.59.

¹⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.5-6.

Dalam membuat kebijakan perlu ada proses analisis kebijakan, William N. Dunn (1994: 17) menggambarkan proses analisis kebijakan melalui lima tahapan yaitu perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan studi mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁶

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif, induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang dicermati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Pendekatan kualitatif juga berusaha melihat dan memahami subyek dan obyek penelitian (seseorang, masyarakat maupun lembaga) berdasarkan fakta yang tampak secara apa adanya (paradigma natural)¹⁸

2. Obyek dan Sumber Data

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁶ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Akasara, 1998), hlm. 40.

¹⁸ Noeng Muhajir, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000), hlm.147.

Obyek penelitian ini adalah kantor dinas pendidikan kabupaten Tuban. Sedangkan sumber data dapat diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun sumber data (subyek) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Kepala Sub Dinas Pendidikan, Kepala Tata Usaha, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Sarana dan Prasarana.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berhubungan secara langsung dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder ini bisa berupa hasil penelitian dan karya ilmiah, buku panduan artikel dan yang lainnya yang dapat menunjang penulisan tesis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat tentang bagaimana pelaksanaan desentralisasi dinas pendidikan Tuban.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara sepihak yang diajukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁹ Metode ini digunakan untuk melakukan wawancara dengan subyek penelitian dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penulisan tesis.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, artikel dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data seperti buku profil lembaga, arsip-arsip dinas pendidikan dan lain sebagainya yang dapat menunjang penelitian.

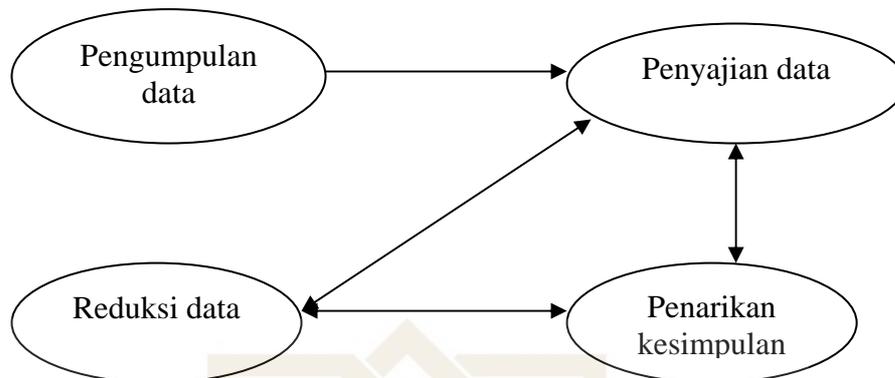
4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terhimpun dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model siklus interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.²¹ Ada empat komponen analisis yang dilakukan dengan model ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Masing-masing komponen berinteraksi dan membentuk siklus. Langkah-langkah analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset II* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 136.

²⁰ *Ibid.*, hlm.72.

²¹ Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Quality Data Analysis (California: Sage Publication, 1994)*, hlm 32.



Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut secara lebih terinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*). Catatan lapangan tersebut berisi tentang apa yang dikemukakan oleh informan dan juga catatan tentang peneliti terhadap informasi yang diberikan oleh sumber informasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang ternyata dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam, tentang objek pengamatan yang telah dilakukan dalam penelitian.

3. *Display Data*

Data yang sudah direduksi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, tulisan yang telah tersusun sistematis. Dengan demikian data tersebut mudah dikuasai dan memudahkan pula dalam penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan/*verifikasi*.

Penarikan kesimpulan/*verifikasi* sudah dilakukan sejak awal penelitian berlangsung. Setiap perolehan data dianalisis dan disimpulkan walaupun maknanya masih agak kabur, tetapi akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung *verifikasi*.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar bisa terarah dan sistematis, maka penulis menggunakan lima bab pembahasan, yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu pertama teori mutu meliputi konsep dasar mutu, pengertian mutu, manajemen mutu terpadu, sasaran mutu, strategi

peningkatan mutu, konsep mutu dalam pendidikan. Kedua teori kebijakan meliputi pengertian kebijakan, proses penentuan kebijakan, kebijakan manajemen lembaga.

Bab ketiga gambaran umum dinas pendidikan Kabupaten Tuban yang menjadi objek penelitian, meliputi visi, misi, dan tujuan dinas pendidikan Kabupaten Tuban, struktur organisasi dinas pendidikan Kabupaten Tuban, tugas dan fungsi dinas pendidikan Kabupaten Tuban era desentralisasi, peta perkembangan pendidikan di Kabupaten Tuban era desentralisasi, kondisi sarana-prasarana dinas pendidikan Kabupaten Tuban, program peningkatan mutu pendidikan di dinas pendidikan Kabupaten Tuban.

Bab keempat berisi tentang analisis dan pembahasan yang meliputi pembahasan tentang proses penentuan kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Tuban, orientasi kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Tuban era desentralisasi, strategi dinas pendidikan Kabupaten Tuban dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pertama strategi peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), kedua strategi peningkatan mutu proses, ketiga strategi peningkatan mutu produk, keempat strategi peningkatan mutu layanan dan kelima strategi peningkatan mutu lingkungan. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor pendukung strategi pengembangan mutu pendidikan, faktor penghambat strategi pengembangan mutu pendidikan, dan terakhir adalah analisis mutu kebijakan dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam peningkatan mutu.

Bab kelima mengakhiri dari pembahasan di atas akan diakhiri dengan kesimpulan hasil pembahasan dan disertai saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis laksanakan secara mendalam tentang strategi peningkatan mutu pendidikan di era desentralisasi (studi kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Tuban).

1. Kebijakan dinas pendidikan Kabupaten era desentralisasi Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pertama, pembentukan tim pengembang mutu didinas pendidikan Tuban yang dikenal dengan tim DBE (*development bank education*). Tim ini dibimbing konsultan pendidikan dari diknas. Kedua, kebijakan peningkatan mutu moral yang dimulai dengan budaya anti korupsi dengan menambahkan mata pelajaran wajib anti korupsi dari mulai sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas. Ketiga, kebijakan pengembangan kurikulum lokal sesuai dengan potensi lokal sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Ada beberapa langkah proses penentuan kebijakan yang dilakukan dinas pendidikan Tuban yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, subjek yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. *Pertama*, mencari akar masalah. Dari masalah-masalah yang ada kemudian di petakan. Dan dipilah-pilah mana yang menjadi prioritas dan dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan dinas pendidikan. *Kedua*, mengumpulkan hasil dari tinjauan pengawas sekolah kepada tim pengembang mutu dinas pendidikan Tuban. *Ketiga*, membuat dan sekaligus mengembangkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah

untuk menemukan problem solving yang ada. *Keempat*, tim pengembang mutu membuat satu rancangan kebijakan yang kemudian akan diajukan ke Bapeda kabupaten Tuban. *Lima*, implementasi kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan, dinas pendidikan kabupaten mensosialisasikannya ke lembaga-lembaga sekolah yang ada. *Enam*, evaluasi kebijakan. Langkah ini diambil oleh dinas untuk mengukur tingkat kesuksesan dari manfaat adanya kebijakan pengembangan mutu. Evaluasi dilakukan berkisar dari empat bulan sekali.

3. Strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu pendidikan adalah Kebijakan strategi dinas pendidikan Tuban dalam peningkatan mutu adalah: 1. peningkatan mutu SDM pertama diinternal; dengan pembinaan sistem informasi manajemen, kedua dieksternal; a) pendidik dan tenaga kependidikan melalui kualifikasi akademik, pembinaan sistem informasi manajemen dan pembinaan tenaga pendidik, pemilihan guru berprestasi, sertifikasi profesi guru, subsidi guru SD, penilaian kinerja Kasek, b) pemuda; peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan penataran, dialog pemuda, kelompok usaha produktif, pembinaan sarjana penggerak pembangunan desa dan seleksi pemuda pelopor, c) masyarakat; pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan desa, pengadaan 1 unit mobil perpustakaan keliling, pengembangan PAUD perkecamatan, pembentukan keaksaraan fungsional untuk pemberantasan buta aksara, pengembangan PKBM, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, pembentukan kelompok belajar usaha. 2. peningkatan mutu proses, 3. peningkatan mutu produk dengan cara

pembangunan perpustakaan, lab. IPA dan lab. komputer, pemberian beasiswa berprestasi dari SD,SMP,SMA/SMK, penyelenggaraan operasi sayang, kompetisi hasil-hasil pembelajaran, penyelenggaraan sekolah satu atap. 4. peningkatan mutu layanan dengan cara, sosialisasi program pendidikan, penjangkauan data jenjang pendidikan, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan. 5. peningkatan mutu lingkungan dengan cara diadakan lomba lingkungan tingkat kabupaten yang disebut Tuban Karya Nugraha (TKN), membudayakan sistem disiplin kerja.

4. Faktor pendukung peningkatan mutu di dinas pendidikan Tuban adalah, struktur organisasi yang sudah ada dengan jelas beserta *job description*, adanya aturan-aturan buat acuan pengembangan baik dari rencana dari pemerintah kabupaten maupun dari pusat, adanya dukungan *stakeholder*, adanya SDM yang potensial, adanya beasiswa dan kenaikan gaji, adanya intruksi kebijakan untuk membentuk tim pengembang mutu dari kabupaten sampai ke sekolah-sekolah.

Faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban; antara lain: Pemahaman yang kurang dari keseluruhan pegawai tentang standar mutu yang akan dicapai oleh dinas pendidikan Tuban, gedung dinas yang kurang representatif, program sertifikasi banyak yang dimanipulasi, BOS hanya diselewengkan karena SDM kurang bertanggungjawab sehingga kurang memenuhi sasaran, dan ada 4 kekosongan di beberapa divisi sehingga terjadi *over leaping job description*.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang strategi peningkatan mutu pendidikan di era desentralisasi (studi kebijakan dinas pendidikan Kabupaten Tuban), penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu tidaklah mudah seperti membalik tangan, butuh proses yang panjang sehingga dibutuhkan sistem manajemen strategis.
2. Untuk stakeholder hendaknya selalu mendukung dan berperan dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan.
3. Memperhatikan potensi dari masing-masing sekolah untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan budaya lokal melalui kurikulum lokal.
4. Mensosialisasikan budaya mutu disetiap lini baik diinternal dan eksternal dinas pendidikan Tuban melalui pemanfaatan APBD I dan APBD II.



DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005
- A., Aspin David, *Quality Scholling*, Melbourn: Cassel, 1993.
- Azwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Benge, Eugene J. *Pokok-pokok Manajemen Modern*, Terj. Rochmulyati Hamzah Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo, 1994
- Danim, Sudarwan, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan Teori*, Jakarta: Proyek Penelitian Dikti, 2006
- Djogo, Tony, *Kelembagaan dan kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri Bandung*; ICRAF, 2003
- Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Yang Penulis Ambil Pada Tanggal 24 Agustus 2009
- Fatah, Nanang *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, 2004.
- Hambali, Djawidi, *Pengembangan Kepemimpinan Transformasional Pada Lembaga Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Huberman, A. Michael dan Matthew B., *Quality Data Analysis*, California: Sage Publication, 1994
- Imran, Ali, *Kebijakan pendidikan di indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan*nya Jakarta: Bumi akasara, 1996
- Islami, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Isworo, Waluyo Imam *Beberapa Pendekatan dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*,
- Jalal, Fasli (ed), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001.

- Jackson, Robert L.Mathis & John H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerjemah Jimmy Sadeli & Bayu Prawira Hie, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Kebijakan*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1998
- Muhajir, Noeng, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jogjakarta: Rake Sarasin, 1992
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2006.
- Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sallis, Edward, *Total Quality Managemen*, London: Kogan: Page Limited, 1993.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrazi, Jogjakarta: Ircisod, 2008.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syamsudin, *Kesiapan Sekolah Dalam Mewujudkan Otonomi Pendidikan; Studi Terhadap Sltp/Mts Dan Smu/Ma Swasta Di Lombok Nusa Tenggara Barat*, Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UNY, 2003.
- Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Supriyadi, Dedi, *Guru di Indonesia; Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga era Reformasi*, Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Direktorat tenaga kependidikan jakarta, 2003
- Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tim Dosen UNM, *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999, *Pemerintah Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara Dengan Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Ibu Endang Trimeidiya In, M.Si., pada tanggal 3 September 2009.

Wawancara Dengan Kasi Kurikulum SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Ibu Dra. Sri Yuliasih, MM. pada tanggal 2 September 2009

Wawancara Dengan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Ibu Endang Trimeidiya In, M.Si., pada tanggal 3 September 2009

Wawancara Dengan KA Subbag Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Drs. Wignyo hadi Wibowo, pada tanggal 4 September 2009

Wawancara Dengan Kasi Pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Katrup, SH. M.Pd., Pada Tanggal 4 September 2009

Wawancara Dengan Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Drs. Tri Fajar wahyudi, M.Si., Pada tanggal 5 September 2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA